

DPR

Undang-Undang (UU) dan atau kebijakan pemerintah yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Para pengusul menilai, pembagian dan penetapan kuota haji tambahan tidak sesuai UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Menurut Selly, keputusan Menteri Agama dalam pelaksanaan haji tahun 2024 bertentangan dengan UU dan tidak sesuai hasil kesimpulan rapat panitia kerja (panja) Komisi VIII DPR RI. Selain itu, menurutnya, tambahan kuota

haji terkesan hanya menjadi kebanggaan, namun tidak sejalan dengan peningkatan pelayanan serta komitmen dalam upaya memperpendek waktu daftar tunggu jemaah haji yang sudah mendaftar. "Kedua, adanya indikasi kuota tambahan di tengah adanya penyalahgunaan oleh pemerintah," katanya. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menilai, pembentukan Pansus Angket Pengawasan Haji oleh DPR RI itu dijamin konstitusi. Oleh karena itu, pihaknya siap mengikuti proses itu.

"Kita ikuti saja. Itu kan proses yang dijamin konstitusi," kata Menag setelah mendampingi Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Grand Syekh Universitas Al Azhar as-Syarif Kairo Mesir, Ahmed Al Tayeb, di Istana Merdeka. Menag Yaqut menyampaikan Kemenag akan menyampaikan kepada DPR semua proses haji mulai dari persiapan sampai dengan ibadah. "(Kami sampaikan) apa adanya," ucap Menag. (Ati/Ant)-f

Sambungan hal 1

BSSN

Hinsa menjelaskan, satgas keamanan akan menjalankan tugas pengamanan, monitoring, proteksi serta penanggulangan dan pemulihan data nasional jika mengalami serangan. Selanjutnya, satgas pengendalian informasi melakukan monitoring dan analisis media sosial dan media massa untuk menanggulangi berita hoaks atau menyesatkan. Satgas itu, kata Hinsa juga berkoordinasi dengan lembaga terkait yang membidangi pengamanan data. "Kemudian, satgas ketiga, satgas sandi melaksanakan penerapan fungsi kriptografi, kontra penginderaan, pengamanan sinyal dan gelar jaringan komunikasi yang aman," jelas Hinsa. Satgas keempat yakni melaksanakan

dan mengedukasi masyarakat dengan memberikan kajian hukum hingga penyampaian informasi tentang kegiatan satgas pemilu. Satgas ini, akan berlangsung sejak H-63 pelaksanaan pilkada serentak hingga H+32 di 37 provinsi seluruh Indonesia. Melalui kerja satgas ini, ia memastikan satgas ini memperkuat seluruh data nasional terkait pemilu dari serangan siber. Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI Mochammad Affuddin mengingatkan jajaran KPU, Bawaslu dan DKPP selalu penyelenggara pemilu untuk mengundurkan diri bila maju atau mencalonkan diri pada Pilkada Serentak 2024. "Bagi penyelenggara yang kok di tengah jalan pengin jadi kepala daerah, itu dihi-

tungnya harus mundur, paling lambat 45 hari sebelum pendaftaran calon," katanya dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di wilayah Sumatera. Ia menyebutkan, para penyelenggara pemilu harus mengundurkan diri terlebih dulu sebelum mendaftarkan diri paling lambat, Jumat (12/7). Ia pun mengaku sudah menerima beberapa surat pengunduran diri dari jajarannya yang hendak terlibat dalam kontestasi setiap lima tahunan itu. Selain itu, Afif menegaskan, ketentuan ini dimuat dalam Pasal 14 Peraturan KPU (PKPU) No 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. (Ant/Obi)-f

Sambungan hal 1

17 Korban

Regu Elite Basarnas Spesial Grup (BSG) merupakan personel terpilih melalui seleksi ketat. Setiap individunya memiliki kemampuan fisik dan mental prima serta berkeahlian khusus dalam bidang SAR gunung hutan, penyelaman laut, medis darurat, termasuk pengoperasian perangkat berteknologi canggih. Sulitnya medan akses menuju lokasi bencana dan tantangan alam yang dihadapi Tim Gabungan di lapangan, kata Edy Prakoso, membuat operasi SAR ini membutuhkan keahlian khusus dan strategi rumit karena memiliki tingkat kesulitan tinggi. Karena itu Pimpinan Basarnas menilai perlu dilakukan penguatan Regu BSG dengan harapan bencana longsor di areal

tambang tersebut tidak berdampak makin luas hingga lebih banyak menimbulkan korban. Basarnas juga sudah mengerahkan personel tambahan dari Kantor SAR Manado ke lokasi bencana di Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Mereka menggenapi ratusan personel Tim SAR Gabungan yang sudah lebih dulu berada di lokasi, terdiri dari Kantor SAR Gorontalo, Korem, Kepolisian Daerah, Palang Merah Indonesia, Kelompok Pencinta Alam, serta grup relawan dan lainnya. Pusat Koordinasi Operasi SAR Basarnas menerima laporan terjadi bencana tanah longsor di areal tambang rakyat di Desa Tulabolo Timur, Suwawa Timur,

Bone Bolango, pada Sabtu (6/7), dan ada jiwa yang terancam serta membutuhkan pertolongan. Informasi awal, peristiwa tanah longsor terjadi pada tengah malam sekitar pukul 23.45 Wita. Saat itu sebagian korban sedang beristirahat dan tertidur pulas di beberapa perkemahan atau warung yang ada di lokasi tambang. Edy Prakoso menyatakan, cuaca menjadi salah satu faktor penentu kelancaran Operasi SAR Gabungan dan beruntung setidaknya hingga Selasa siang atau hari ketiga pascakejadian bencana, cuaca dalam keadaan cerah dan berawan. Satu unit helikopter dari Polda Gorontalo turut disiyagakan untuk menunjang kelancaran evakuasi korban. (Ant/San)-f

Sambungan hal 1

Bebas,

Indonesia yang telah memberikan dukungan terhadap anaknya hingga dinyatakan bebas pada perkara tersebut. Kartini menyinggung peran penting para sukarelawan dan tim kuasa hukum yang tanpa pamrih membantu membebaskan Pegi dari status tersangka "Dukungan dari seluruh penjurur Indonesia sungguh luar biasa. Saya berharap mereka mendapat rezeki berlimpah dan umur yang panjang," ucapnya. Terpisah, Tim Kuasa hukum Pegi Setiawan menuntut ganti rugi yang totalnya mencapai ratusan juta rupiah kepada Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat,

usai gugatan praperadilan yang diajukan oleh kliennya dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung. "Kurang lebih Rp 175 juta dari dua sepeda motor yang ditahan Polda Jabar dengan ditambah penghasilan setiap bulan Rp 5 juta sebagai kuli bangunan yang terhenti selama tiga bulan," kata Kuasa hukum Pegi Setiawan, Toni RM di Bandung. Dijelaskan, Pegi Setiawan selama ditahan tidak kehilangan penghasilan dan pekerjaan yang selama ini menjadi tumpuan hidup keluarganya. Sebagai kuli bangunan, penghasilan kliennya itu cukup membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari dan biaya pendidikan kedua adiknya. "Sehingga ketika ditahan, Pegi kehilangan penghasilan. Maka kami nanti berdiskusi dengan tim penasihat hukum berencana akan mengajukan gugatan ganti kerugian," kata Toni. Ditambahkan, keluarga Pegi merasa malu dengan penetapan tersangka tersebut. Selain itu, pihaknya meminta Polda Jabar mengemukakan bahwa kliennya sudah tidak ditetapkan sebagai tersangka. "Amar putusan rehabilitasi penyidik mengemukakan Pegi tersangka Polda Jabar untuk mengemukakan tidak lagi tersangka," pungkas Toni. (Ant/Has)-d

Sambungan hal 1

Keadilan

Putusan perkara Pra Peradilan no.10 /praPid./2024/PN.Bdg yang berisi 9 amar antara lain, mengabulkan permohonan pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Artinya, seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh pemohon terbukti benar seluruhnya dan dalil bantahan/sanggahan dari termohon tidak berhasil mematahkan dalil permohonan pemohon dan tidak berhasil meyakinkan hakim, lalu menyatakan secara hukum penangkapan dan penahanan Pegi Setiawan serta tindakan yang menyertainya tidak sah dan batal demi hukum. Selain itu juga menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan surat penetapan tersangka atas nama Pegi Setiawan (pemohon) batal demi hukum serta memerintahkan termohon untuk menghentikan penyidikan kepada pemohon Pegi Setiawan serta memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon Pegi Setiawan dari tahanan serta memulihkan dan mengembalikan hak dan martabat Pegi Setiawan seperti

sediakala. Demikian bunyi amar putusan perkara Pra Peradilan no.10/Pid.Pra/2024/PN Sby. Dengan adanya putusan pra peradilan itu apakah perkara kasus kematian Eky dan Vina sudah selesai dan ditutup? Tentu saja tidak! Karena dari persidangan tahun 2016 di PN Cirebon yang telah menjatuhkan vonis/menghukum 5 orang terpidana (yang hingga kini 4 orang masih menjalani hukuman) itu masih menyisakan catatan yang belum terhapus yakni status DPO nya 3 orang tersangka iainnya yang hingga 8 tahun tidak ada kejelasan dan tindakan hukum apapun, yang kemudian menangkap dan menahan serta menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka (yang masuk dalam DPO) sebagai salah satu pembunuh korban Eky dan Vina 8 tahun yang lalu. Meski diketahui bahwa nama salah satu dari 3 orang tersangka dalam daftar DPO adalah Pegi alias Perong bukan Pegi Setiawan dimana juga ciri-ciri dan alamatnya berbeda penyidik tetap mem-

proses dan menyidik serta menahan Pegi Setiawan yang proses hukumnya oleh putusan pra peradilan dinyatakan un prosedur maka tidak sah. Karena prosedur proses penetapan tersangka, penyidikan terhadap tersangka Pegi Setiawan tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri (PERKAP) no.14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Dari kasus persidangan pra peradilan ini dapat dianggap sebagai bahan introspeksi dan koreksi terhadap kinerja aparat Kepolisian serta adanya tindak sewenang wenang yang terkesan terjadinya pemaksaan kehendak dan kurang profesional. Di lain pihak putusan pra peradilan ini sebagai kado ulang tahun ke-78 Kepolisian RI untuk dalam setiap proses penanganan perkara selalu menerapkan prinsip keadilan yang merupakan salah satu harapan (asa) dari Negara Hukum. (Penulis adalah Advokat dan dosen Sarjana dan Pascasarjana FH-UII, FH UWM dan Fishipol UNY)-f

Sambungan hal 1

KERJA SAMA UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH
Bank BPD DIY Syariah Tingkatkan Sinergi



KR-Istimewa

Penandatanganan kerja sama Bank BPD DIY Syariah dengan Universitas SIBERMU.

YOGYA (KR) - Tingkatkan sinergi dan kerja sama, Bank BPD DIY Syariah dan Universitas Siber Muhammadiyah (SIBERMU) menandatangani perjanjian kerja sama di Kampus Pusat Universitas SIBERMU, Jalan HOS Cokroaminoto, Yogyakarta, Selasa (9/7). Acara di-hadiri Rektor Universitas SIBERMU Dr Ir Bambang Riyanta ST MT dan Pemimpin Cabang Bank BPD DIY

Syariah Saifuddin Anshori beserta jajarannya. Kerja sama ini mencakup berbagai aspek terkait pengelolaan keuangan dan pemanfaatan jasa perbankan lainnya untuk meningkatkan kerja sama antara Universitas SIBERMU dan Bank BPD DIY Syariah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa dan seluruh sivitas akademika. Bambang Riyanta men-

gapresiasi kerja sama ini sebagai langkah strategis untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik di lingkungan universitas. "Kami berharap, kerja sama ini dapat membawa manfaat besar bagi kedua belah pihak," katanya.

Saifuddin Anshori mengaku bangga dapat menjalin kemitraan dengan Universitas Siber Muhammadiyah. "Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pengelolaan keuangan universitas serta menyediakan berbagai layanan perbankan yang bermanfaat," tambahnya.

Dengan kerja sama ini, diharapkan tercipta sinergi yang positif antara dunia pendidikan dan sektor perbankan, khususnya dalam pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan terintegrasi. (Rsv)-d

26.415 Kontainer

Sambungan hal 1

Nanti kalau ada yang enggak sesuai pasti dilarang Kementerian Perindustrian, nanti kalau ada yang enggak sesuai pasti dilarang Kementerian Perdagangan, kalau enggak sesuai pasti dilarang PT Surveyor, banyak pihak yang mengawasinya," kata Askolani usai Rapat Kerja Badan Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan dan Bank Indonesia di Jakarta, Selasa (9/7). Hingga saat ini, ia mengaku masih belum mengetahui isi kontainer tersebut. Terkait dugaan kontainer isi berisi barang-barang tekstil dan produk tekstil (TPT), Akolani menyatakan, akan diperiksa lebih lanjut oleh pihak Bea Cukai. "Isinya pasti ikutin ketentuan. Kalau ada yang larangan dan pembatasan (lartas), itu tidak ada barang yang langsung lolos, pasti dicek. Izin perdagangan, izin sama PT Surveyor Indonesia, panjang tuh urusannya. Itu bukan hanya urusan Bea Cukai saja. Itu urusan semua pihak," ujarnya. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, pihaknya ingin mengetahui isi 26.415 kontainer atau peti kemas yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak, guna menyiapkan

strategi pencegahan yang efektif dalam melindungi industri dalam negeri. "Sebanyak 26.000 itu is a big number, besar sekali. Kalau kita bicara soal 100-200 kontainer ya mungkin kita tidak akan terlalu pusing, tapi ketika kita mempunyai 26.000 kontainer, kita mempunyai kepentingan tentu untuk memitigasi," kata Menperin. Menurutnya, keterbukaan data terkait isi kontainer tersebut merupakan hal utama yang mesti diketahui, mengingat dari 26.415 peti kemas yang tertahan berpotensi berisi bahan baku industri yang mengancam industri domestik. "Saya juga pengen tau, tentukan barang-barang itu jangan-jangan bahan baku, kalau bahan baku di sektor apa barang-barang itu? Jangan-jangan barang jadi, misalnya pakaian jadi, misalnya TV elektronik, barang-barang elektronik," katanya. Menperin mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat ke Kementerian Keuangan untuk meminta keterangan, dan data terkait isi dari peti kemas yang tertahan di dua pelabuhan itu, namun belum mendapatkan tanggapan. "Belum ada respons," katanya. (Ant/San)-f

Pengusaha

Sambungan hal 1

"Kami meminta agar semua pelaku pertambangan yang belum mengantongi izin untuk segera mengurus perizinan terlebih dahulu, sebelum melakukan operasi produksi. Jika perizinan sudah dimiliki, mereka bisa melakukan aktivitas pertambangan kembali. Selain mengantongi izin, kami juga meminta aktivitas penambangan yang dilakukan jangan sampai merusak lingkungan," tandasnya. DPUP ESDM DIY telah memberikan surat imbauan penghentian aktivitas penambangan ilegal di 32 titik yang tersebar di beberapa daerah di DIY. Berdasarkan data terakhir

yang diterima DPUP ESDM DIY pada 4 Juli 2024, terdapat 32 titik pertambangan ilegal di seluruh DIY. Dari jumlah tersebut, delapan di antaranya baru mengantongi izin eksplorasi. Pertambangan tersebut berada di wilayah darat dan sungai. Adapun titik paling banyak di Kabupaten Kulonprogo sebanyak 15 titik pertambangan ilegal (13 di wilayah sungai dan dua di darat). Sedangkan di Kabupaten Bantul ada 11 pertambangan ilegal, terdiri empat di darat dan tujuh di sungai. Sementara di Kabupaten Gunungkidul dan Sleman masing-masing terdapat tiga lokasi pertambangan ilegal di wilayah darat. (Ria)-f

Pegawai

Sambungan hal 1

Judi Online melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024. Satgas ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, dengan Wakil Ketua Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Ketua Harian Pencegahan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, serta Wakil Ketua Harian Pencegahan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Kemenkominfo Usman Kansong. Selain itu, Ketua Harian Penegakan Hukum diamban

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapoli) Listyo Sigit Prabowo dan Wakil Ketua Harian Pene-sugakan Hukum Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Wahyu Widada. Mendampingi Wapres saat memberikan keterangan pers kali ini, Anggota Komisi

V DPR Mulyadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Edwin Syahruzad. (Ati)-d



Advertisement for Universitas Amikom Yogyakarta's Creative Economy Park. The main headline is 'Ketakutan Tertinggal dan Kesehatan Mental Remaja'. It features a portrait of Anggun Anindya Sekarningrum, a communication science lecturer. The text discusses the impact of FOMO (Fear of Missing Out) on mental health, particularly in the digital age. It highlights the importance of digital literacy and mental health support for young people. The advertisement includes contact information for the university and its Creative Economy Park.